



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. RM. Nur Atmadibrata No. 1 Telp 62507, 63494, Fax. 65598, 62122

Email : kantor@bappedajambi.go.id

http://www.bappedajambi.go.id

J A M B I

RINGKASAN KONTRAK

Nomor : 0052 /SPM-LS /Bappeda/VI/2018

1. Nomor dan Tanggal DPA : 4.03.4.03.01.02.07.5.2/ 9 Januari 2018
2. Kode Rekening : 5.2.3.49.14
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : SPK No. 04/K/SPK-PL/BAPPEDA/III/2018 Tanggal, 27 Maret 2018
4. Nama Kontraktor/ Perusahaan : CV. DIVA AGUNG LESTARI
5. Nama Direktur/ Kuasa Direktur : E D I S O N
6. Alamat Kontraktor : Jl. Letkol A. Tarmizi Kadir RT. 15 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi
 - Nama Bank : Bank 9 Jambi
 - Nomor Rekening : 101262901
 - NPWP : 31.685.777.0-331.000
7. Nilai Kontrak SPK : Rp. 149.500.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
8. Uraian dan Volume Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Kanopi Parkir Mobil Kantor Bappeda berdasarkan SPK Nomor : 04/K/SPK-PL/BAPPEDA/III/2018 Tanggal, 27 Maret 2018 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 106/CV. Diva Agung Lestari/V/2018 Tanggal, 15 Mei 2018.
9. Cara Pembayaran : Lunas 100%
10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 50 (Lima Puluh) hari kalender mulai tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan 15 Mei 2018
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 15 Mei 2018
12. Jangka waktu pemeliharaan : -
13. Progres Fisik : -
14. Ketentuan sanksi : Jika terjadi keterlambatan, akan dikenakan denda sebesar 1/1000 dari Nilai Kontrak dan setinggi-tingginya 5 % dari Harga Kontrak.

Jambi, 04 Juni 2018

PIR. KEPALA BAPPEDA
Sebagai Pengguna Anggaran,

Ir. HUSNI DJAMAL, M.ArSt
Pembina Utama Madya
NIP. 19580615 198410 1 001

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
 - a. PA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
4. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PA. Jika diminta oleh PA maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PA sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PA tetap pada PA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. **CACAT MUTU**
PA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PA dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PA mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PA, maka PA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
9. **ASURANSI**
 - a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua Jasa Lainnya dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PA.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PA menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PA dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan

Standar Dokumen Pengadaan
Pengadaan Jasa Lainnya

Metoda Pengadaan Langsung

[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

- dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PA.
- d. PA menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.
- 16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI**
- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PA, Jasa Lainnya tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. PA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - c. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PA, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Jasa Lainnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - d. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Jasa Lainnya akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PA akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PA. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PA dari nilai tagihan Penyedia.
 - e. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PA dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.
- 17. PERUBAHAN SPK**
- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
 - b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PA.
- 18. PERISTIWA KOMPENSASI**
- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PA menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PA;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
 - b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
 - d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
 - e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

Standar Dokumen Pengadaan
Pengadaan Jasa Lainnya
Metoda Pengadaan Langsung

[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PA, dan selanjutnya menjadi hak milik PA;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PA.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PA;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PA menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PA, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *sistem pembayaran per-triwulan*;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan

Standar Dokumen Pengadaan
Pengadaan Jasa Lainnya
Metoda Pengadaan Langsung

[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

- pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PA dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PA mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PA dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. RM. Nur Atmadibrata No. 1 Telp. 62507, 63494 – Fax. 65598, 62122
Email : kantorbappedajambi.go.id
<http://www.bappedajambi.go.id>
J A M B I

RINGKASAN KONTRAK

Nomor : /SPM-LS/Bappeda/XII/2018

1. Nomor dan Tanggal DPA : 4.03.4.03.01.01.01.13. 5.2.3.29.05. tanggal 26 Oktober 2018
2. Kode Rekening : 5.2.3.29.05
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : SPK Nomor : 03/PPK-PRT/BAPPEDA/XI/2018 tanggal 19 November 2018.
4. Nama Kontraktor/Perusahaan : **CV. CAPITAL INVESTAMA SEDAYA**
5. Nama Direktur/Kuasa Direktur : FAUZAN
6. Alamat Kontraktor : Jl. Matahari 1 No. 07 RT. 12 Kel. Selamat Kec. Telanaipura Kota Jambi.
 - Nama Bank : Bank 9 Jambi.
 - Nomor Rekening : 3001487476
 - N P W P : 76.360.456.8-331.000
7. Nilai Kontrak SPK : **Rp. 194.183.000,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)**
8. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer berdasarkan SPK Nomor : 03/PPK-PRT/BAPPEDA/XI/2018 tanggal 19 November 2018. Dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 66/CV-CIS/PNW/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018.
9. Cara Pembayaran : Lunas 100%
10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 (tiga puluh) Hari Kalender , mulai tanggal 19 November sampai dengan 19 Desember 2018.
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 19 Desember 2018
12. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
13. Progres Fisik : -
14. Ketentuan Sanksi : Bila terjadi keterlambatan pekerjaan akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari keterlambatan dan maksimal 5 % dari nilai SPK.

Jambi, Desember 2018


DR. DONNY ISKANDAR, S.Sos, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19691125 199703 1 004



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

DENGAN

CV. CAPITAL INVESTAMA SEDAYA



KEGIATAN	: KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
PAKET PEKERJAAN	: BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN PERALATAN PERSONAL KOMPUTER
NO. SPK	: /PPK-PRT/BAPPEDA-1.1/XI/2018
TANGGAL	: 19 NOVEMBER 2018
SUMBER DANA	: APBD PROVINSI JAMBI

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. PA/KPA/PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

4. HAK KEDIREKTURAN

- a. PA/KPA/PPK berhak atas keDirekturan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PA/KPA/PPK. Jika diminta oleh PA/KPA/PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak keDirekturan tersebut kepada PA/KPA/PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak keDirekturan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PA/KPA/PPK tetap pada PA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PA/KPA/PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PA/KPA/PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PA/KPA/PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PA, maka PA/KPA/PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua Jasa Lainnya dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA/KPA/PPK beserta instansinya terhadap semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA/KPA/PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PA/KPA/PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PA/KPA/PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PA/KPA/PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PA/KPA/PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PA/KPA/PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.

- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PA/KPA/PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA/PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA/KPA/PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PA/KPA/PPK.
- d. PA/KPA/PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PA/KPA/PPK, Jasa Lainnya tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. PA/KPA/PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- c. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PA/KPA/PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Jasa Lainnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Jasa Lainnya akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PA/KPA/PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PA/KPA/PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PA/KPA/PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PA/KPA/PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PA/KPA/PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- e. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PA/KPA/PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PA.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PA/KPA/PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PA/KPA/PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PA/KPA/PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan

- kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- 6) PA/KPA/PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- 7) PA/KPA/PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PA/KPA/PPK;
- 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PA/KPA/PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA/KPA/PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA/KPA/PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PA/KPA/PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PA/KPA/PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PA/KPA/PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PA/KPA/PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PA/KPA/PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PA/KPA/PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PA/KPA/PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PA/KPA/PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PA/KPA/PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- e. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) penyedia membayar denda; dan/atau
2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PA/KPA/PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PA/KPA/PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PA/KPA/PPK, dengan ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan dengan *sistem pembayaran per-triwulan*;
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PA/KPA/PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PA/KPA/PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

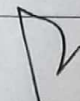
Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PA/KPA/PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

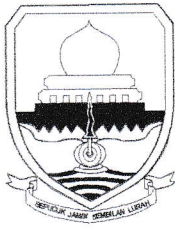
23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PA/KPA/PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PA/KPA/PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

PARAF	
PPK	
Penyedia	



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. RM. Nur Atmadibrata No. 1 Telp. 62507, 63494 – Fax. 65598, 62122

Email : kantorbappedajambi.go.id

<http://www.bappedajambi.go.id>

J A M B I

Jambi, **26** Agustus 2020
Muharam 1442 H

Nomor : 005-**2652**/Bappeda-2.1/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Undangan Rapat Pendahuluan**

Kepada Yth :
Sdr. (Daftar Undangan
Terlampir)
di -

T E M P A T

Sehubungan dengan pekerjaan Jasa Penyusunan Dokumen Kerangka Ekonomi Makro Provinsi Jambi pada kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Jambi, maka dengan ini kami mengundang saudara untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Senin, 31 Agustus 2020
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Jambi
Jln. RM. Nur Atmadibrata No. 1
Acara : Rapat Pendahuluan Penyusunan Dokumen Kerangka
Ekonomi Makro Provinsi Jambi.
Media Virtual : *Zoom Meeting*
ID Meeting : 851 9098 0070
Password : kemj4mbi

Mengingat pentingnya rapat tersebut, diharapkan kehadiran saudara lima belas menit sebelum acara berlangsung.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BAPPEDA,

Dr. DONNY ISKANDAR, S.Sos, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19691125 199703 1 004

Tembusan:

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan).
2. Arsip.

LAMPIRAN SURAT UNDANGAN

Nomor : 005-265/Bappeda-2.1/VIII/2020

Tanggal : 26 Agustus 2020

Daftar penerima surat undangan:

1. Kabid Ekonomi Bappeda Provinsi Jambi;
2. Kabid Pendanaan dan Evaluasi Bappeda Provinsi Jambi;
3. Kasubbid Perkebunan, Kelautan dan Perikanan;
4. Kasubbid Sarpras Bappeda Provinsi Jambi;
5. Kasubbid Perkim Bappeda Provinsi Jambi;
6. Kasubbid Pemerintahan Bappeda Provinsi Jambi;
7. Kasubbid Tata Ruang, SDA dan LH Bappeda Provinsi Jambi;
8. Kasubbid Pendanaan Bappeda Provinsi Jambi;
9. Kasubbid Industri, Perdagangan dan Pengembangan Usaha;
10. Kasubbid Pertanian dan Ketahanan Pangan;
11. Kasubbid Dokumentasi dan Pelaporan;
12. Kasubbid SDM dan Kependudukan;
13. Kasubbid Sosial dan Budaya;
14. Kasubbid Evaluasi dan Pengendalian Bappeda Provinsi Jambi;
15. Para Pejabat Fungsional Bappeda Provinsi Jambi;
16. Tim Persiapan Penyusunan Dokumen Kerangka Ekonomi Makro Provinsi Jambi;
17. Tim Pengawasan Penyusunan Dokumen Kerangka Ekonomi Makro Provinsi Jambi;
18. Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen Kerangka Ekonomi Makro Provinsi Jambi;





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. RM. Nur Atmadibrata No. 1 Jambi Telp. (0741) 62507, 63494 Fax. (0741) 65598

J A M B I

SURAT PERJANJIAN

(Lump Sum)

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi:
BIAYA JASA PENYUSUNAN SITE PLAN KAWASAN STRATEGI
Nomor : 01/SP/BAPPEDA-1/VIII/2019

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kantor BAPPEDA Provinsi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **Empat Belas** bulan **Agustus** tahun **dua ribu sembilan belas** berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 222.12 B/Pokmil 7/2019 tanggal 08 Agustus 2019 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: S-23/SPPBJ/Bappeda-1/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 antara :

Nama : **DIAN MARTIYOSA, ST**
NIP : 19820315 200804 1 002
Jabatan : Kepala Seksi Tata Ruang Dinas PUPR Provinsi Jambi
Berkedudukan di : Jl. H. Agus Salim No. 02 Kotabaru Jambi.

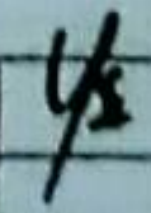
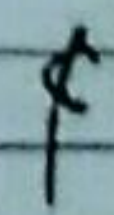
Yang bertindak untuk dan atas nama BAPPEDA Provinsi Jambi selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**" dan :

Nama : **ERWINSYAH, ST**
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jalan Merabu III No. 35 Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung Kota Jambi
Akta Notaris : 03
Nomor :
Tanggal : 13 Januari 2010
Notaris : Muhammad Baiquni Haqqi, SH

Yang bertindak untuk dan atas nama **CV. Mitra Yenuko Pratama** selanjutnya disebut "**Penyedia**"

MENINGAT BAHWA:

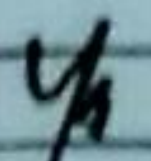
- (a) Pejabat Pembuat Komitmen telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

Paraf Pihak KPA	
Paraf Pihak Penyedia	

- (c) Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *"Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp. 293.810.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening Bank Jambi Cabang Utama dengan Rekening No: 101220265 NPWP 01.514.887.7-331.000 atas nama Penyedia CV. MITRA YENUKO PRATAMA*
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f) Kerangka Acuan Kerja;
 - g) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - h) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

Paraf Pihak KPA	
Paraf Pihak Penyedia	

- a) Peryecta berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi untuk Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada peryecta sesuai dengan ketentuan Kontrak.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 14 - 08 - 2019 sebagaimana juga diatur dalam Syarat-Syarat Umum Khusus Kontrak.

Dengan Demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan peryecta telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Peryecta
CAI. MITRA YENUNO PRATAMA

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
DAN MARTYOSA ST. Provinsi Jambi


ERWINSYAH, ST
Direktur


DAN MARTYOSA, ST.
Pejabat Pembuat Komitmen
NIP. 19820315 200604 1 002

Hal. 1 dari 1

Paraf Pihak KPA	
Paraf Pihak Peryecta	



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. RM. Nur Atmadibrata No. 1 Jambi Telp. (0741) 62507, 63494 Fax. (0741) 65598
J A M B I

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Pengadaan Barang:
PENGADAAN SMART SCREEN DAN KELENGKAPAN LAINNYA
Nomor : 03/SP/BAPPEDA/APBDP/X/2019

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pada hari **Senin** tanggal **Empat** bulan **November** tahun **Dua ribu sembilan belas** berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi yang dilakukan di Aplikasi *e-Purchasing* dengan Kode Paket **PKM-P1910-1970848** tanggal 31 Oktober 2019 antara:

Nama : **DIAN MARTIYOSA, ST**
NIP : **19820315 200804 1 002**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen BAPPEDA Provinsi Jambi**
Berkedudukan di : **Jl. RM. Nur Atmadibrata No. 1 Telanaipura Jambi.**

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**" dan :

Nama : **OLIVER JOHANES SETIAWAN**
Jabatan : **Direktur**
Berkedudukan di : **Jl. Klampis Jaya 29 E Kel. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Surabaya**
Akta Notaris : **57**
Nomor :
Tanggal : **07 April 2000**
Notaris : **Mutia Haryani, SH.**

Yang bertindak untuk dan atas nama **CV. Anugrah Pratama** selanjutnya disebut "**Penyedia**"

MENINGAT BAHWA:

- (a) Pejabat Pembuat Komitmen telah meminta penyedia untuk melakukan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah

Hal. 1 dari 3

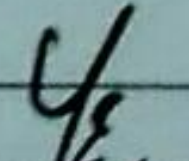
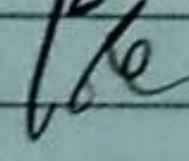
Paraf Pihak PPK	
Paraf Pihak Penyedia	

menyetujui untuk menyediakan Jasa Pengadaan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (c) Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *"Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak-pajak yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum di Aplikasi e-purchasing adalah sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)**. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening Bank Danamon Rekening No: **007700023125 NPWP 01.879.625.0606-000** atas nama Penyedia **CV. Anugrah Pratama**.*
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e) Bukti Transaksi dan Negosiasi yang dilakukan di Aplikasi e-Purchasing;
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.

Paraf Pihak PPK	
Paraf Pihak Penyedia	

dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.

5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a) Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Pengadaan Barang untuk Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. Anugrah Pratama



OLIVER JOHANES SETIAWAN
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jambi



DIAN MARTIYOSA, ST
Penata/ III.c
NIP. 19820315 200804 1 002

Paraf Pihak PPK	
Paraf Pihak Penyedia	



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. RM. Nur Atmadibrata No. 1 Jambi Telp. (0741) 62507, 63494 Fax. (0741) 65598

J A M B I

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor: 23/SPK/BAPPEDA/APBD/VIII/2019

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **DIAN MARTIYOSA, ST**
NIP : 19820315 200804 1 002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BAPPEDA Provinsi Jambi
Alamat : Jln. RM. Nur Atmadibrata No. 1 Telanaipura Jambi

Selanjutnya disebut **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

2. Nama : **JOKO IMAM PRAYITNO, SE**
Jabatan : Direktur Utama **PT. HOKINDO ARCITA NUSANTARA**
Alamat : Jl. Belibis II RT. 37 Kec. Jelutung Kota Jambi

Selanjutnya disebut **PENYEDIA**

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dan **PENYEDIA** yang selanjutnya disebut para pihak sepakat untuk melaksanakan Perintah Kerja tentang Pekerjaan **Penyusunan Rancangan Pergub Analisa Standar Belanja** yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

P a s a l 1

DASAR SURAT PERINTAH KERJA

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
2. DPA – SKPD BAPPEDA Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Nomor: 4.03.01.07.01.5.2 tanggal 07 Januari 2019 dalam Kegiatan Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Keputusan Gubernur Jambi Nomor: No. 1/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat

DPMED, Dinas, Inspektori, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.

4. Keputusan Kepala BAPPEDA Provinsi Jambi Sebagai Pengguna Anggaran pada BAPPEDA Provinsi Jambi Nomor: 03 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan BAPPEDA Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
5. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor: BAHPL-23/PPBJ/BAPPEDA/VIII/2019 Tanggal 20 Agustus 2019.
6. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPJ) Nomor: S-23/SPPJ/Bappeda-1/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019.

P a s a l 2

TUGAS PEKERJAAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN memberi tugas kepada **PENYEDIA** untuk melaksanakan pekerjaan **Penyusunan Rancangan Pergub Analisa Standar Belanja**.

P a s a l 3

BIAYA PEKERJAAN

1. Besarnya biaya Pekerjaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebesar **Rp. 199.650.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** Termasuk PPN 10% dibebankan dalam DPA - SKPD BAPPEDA Provinsi Jambi Nomor 4.03.01.07.01.5.2 tanggal 07 Januari 2019 dalam Kegiatan Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Jumlah biaya tersebut diatas sudah termasuk PPN 10%.

P a s a l 4

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran pekerjaan sesuai dengan pasal 3 Surat Perintah Kerja sebesar **Rp. 199.650.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** Termasuk PPN 10% akan dilakukan ke **PENYEDIA** pada rekening Bank Jambi Cabang Utama Nomor **3001687537**, NPWP **84.015.399.3-331.000** atas nama Penyedia **PT. HOKINDO ARCITA NUSANTARA** setelah pekerjaan tersebut diterima secara fisik dalam keadaan baik dan cukup oleh **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.

P a s a l 5

JANGKA WAKTU PEKERJAAN

PENYEDIA berjanji akan menyelesaikan pekerjaan tersebut kepada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** dalam keadaan baik dan cukup sesuai pasal 2 diatas selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung dimulai dari tanggal **22 Agustus 2019** sampai tanggal **20 Oktober 2019**.

P a s a l 6

SANKSI DAN DENDA

Apabila **PENYEDIA** tidak menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka untuk setiap hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) dari biaya pengadaan.

P a s a l 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak ada kata sepakat antara kedua belah pihak maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dan memilih tempat yang sah dan tidak berubah pada pengadilan Negeri Jambi.

P a s a l 8

KETENTUAN HUKUM DAN DOMISILI

Untuk melaksanakan Surat Perintah Kerja (SPK) kedua Belah Pihak memilih tempat kedudukan Hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah ke Panitera pengadilan Negeri Jambi.

P a s a l 9

LAIN - LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perintah Kerja Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja (SPK) ini. Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat dalam 5 (Lima) rangkap yang bermaterai cukup semuanya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

P a s a l 10

MULAI BERLAKU SURAT PERINTAH KERJA

Untuk Perintah Kerja ini dinyatakan sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, seperti tercantum pada halaman depan.

P a s a l 11

P E N U T U P

Surat Perintah Kerja (SPK) ini di tanda tangani oleh kedua belah pihak di Jambi pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PENYEDIA

PT. HOKINDO ARCITA NUSANTARA



JOKO IMAM PRAYITNO, SE
Direktur Utama

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BAPPEDA Provinsi Jambi



DIAN MARTIYOSA, ST

Penata / III. c

NIP. 19820315 200804 1 002